

**ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DALAM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN
MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT**

Sonya Oktofina D Dowansiba

NPP. 30.1562

Asdaf Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: sonyaoktofina19@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr.Drs. H. Maisondra., SH, MH, M.Pd, Dipl.Ed, M.A.P

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Very low regional financial independence and high dependence on the central government in Manokwari Regency became the background of this study. **Purpose:** This study aims to find out the level of regional financial independence in supporting the improvement of community welfare over the past 5 years as seen from the analysis of financial ratios and human development index levels. **Method:** The method used is qualitative descriptive research with an inductive approach. Data collection techniques are carried out by observation, semi-structured interviews and documentation. **Result:** The results showed that the level of financial independence of Manokwari Regency is still low in the last 5 years, namely from 2017-2021 with an average ratio of regional financial independence of 8,5 %, the average ratio of the degree of regional financial dependence of 79,7%, the average degree of fiscal decentralization of 6,69%, the average effectiveness of regional native income management is 60,38%, and the level of community welfare which is already at the high category level with the average HDI of 71.50% **Conclusion:** Based on the results of this analysis, local governments need to issue strategic efforts by empowering regional potentials that can be used as sources of regional revenue so that they can support the implementation of regional autonomy and increase the financial independence of the region itself. And for the welfare of society has reached the high category.

Keywords: Analysis of Independence, Regional Finance, Community Welfare Manokwari Regency.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemandirian keuangan daerah yang sangat rendah serta ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat di Kabupaten Manokwari menjadi latar belakang dari penelitian ini. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam 5 tahun terakhir yang dilihat dari analisis rasio keuangan dan tingkat indeks pembangunan manusia. **Metode:** Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manokwari masih rendah dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2021 dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah 8,5 %, rata-rata rasio derajat ketergantungan keuangan daerah 79,7%, rata-rata derajat desentralisasi fiskal 6,69%, rata-rata efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah 60,38%, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah berada pada tingkat kategori tinggi dengan rata-rata IPM yaitu 71.50%. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil analisis tersebut pemerintah daerah perlu mengeluarkan upaya strategis dengan melakukan pemberdayaan potensi daerah yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah sehingga dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah itu sendiri. Dan untuk kesejahteraan masyarakat sudah mencapai kategori tinggi.

Kata Kunci: Analisis Kemandirian, Keuangan Daerah, Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Manokwari

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, kewajiban dan wewenang suatu daerah guna mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat daerahnya sendiri tetapi masih tetap berpedoman dengan peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah diadakan dan dilaksanakan untuk kepentingan daerah itu sendiri guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian daerah otonom tersebut. Tetapi pada kenyataannya dilapangan masih sangat banyak daerah di Indonesia yang belum maksimal dalam menjalankan dan mewujudkan tujuan dari otonomi daerah. Pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah dapat menunjukkan kemampuan keuangan suatu daerah. Kemampuan keuangan daerah menjadi tolak ukur penyelenggaraan otonomi daerah. Keberhasilan pemerintah daerah melaksanakan otonomi daerah diukur dari kinerja pendapatan asli daerah yang apabila pendapatan asli daerah meningkat dari waktu ke waktu

dan dapat memenuhi kebutuhan daerah maka dikatakan telah memiliki kemampuan keuangan.

Pelaksanaan pengukuran kemampuan atas keuangan suatu daerah ialah dengan menghitung rasio keuangan yang terdiri dari beberapa bagian. Mahmudi (2019: 140) mengemukakan bahwa dengan mengacu pada pendapatan asli daerah, untuk mengukur kemampuan keuangan digunakan beberapa rasio keuangan yang terdiri dari : Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Derajat Ketergantungan, dan rasio Kemandirian keuangan serta Rasio Efektivitas pengelolaan PAD.

Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari masih sangat rendah pada pelaksanaan otonomi daerah jika dilihat pada Pendapatan Daerah pada struktur APBD 5 tahun anggaran terakhir, rendahnya kemandirian keuangan daerah ini tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai indikator kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara atau wilayah (United Nations Development Programme). Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Manokwari pada 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang berada pada angka rata-rata 70,67%-72,02% (badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari, 2022), nilai IPM ini sudah berada pada tingkat kategori tinggi sesuai penilaian Indeks Pembangunan Manusia yaitu $50 < IPM < 80$. Namun pemerintah daerah Kabupaten Manokwari harus memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Manokwari, dengan didukung oleh kemandirian keuangan daerah dalam membiayai jalannya pemerintahan di Kabupaten Manokwari.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan rendahnya kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Manokwari. Beberapa faktornya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat rendah serta pemanfaatan dan pengelolaan PAD yang belum optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah serta peraturan daerah yang tidak jelas, menjadi kendala dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manokwari. Hal tersebut juga menandakan masih sangat bergantungnya pemerintah daerah terhadap dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kemandirian keuangan yang rendah di Kabupaten Manokwari akan berdampak pada jalannya pelaksanaan otonomi daerah dalam mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dapat dijadikan bahan acuan dan sumber referensi dalam melakukan sebuah penelitian, hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan pembandingan dan untuk memberikan inspirasi dengan topik penelitian yang hampir

sama. Penelitian yang dilakukan Risky Sandroyto Pangaribuan berjudul Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tobasa Provinsi Sumatera Utara (Pangaribuan, 2020) Hasil penelitian tersebut yaitu: (1) Kemandirian keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. (2) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. (3) Kemandirian keuangan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian Aceng Abdul Hamid menemukan bahwa terdapat pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pendapatan perkapita, terdapat pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap angka usia harapan hidup dan terdapat pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap lama sekolah (Hamid, 2018). Dan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kamilaus Konstase Oki, Frederic W. Nalle dan Pricilia A.V. Meomanu, berdasarkan penelitian tersebut tentang Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu, penulis menemukan bahwa rasio desentralisasi fiskal kabupaten belu dikategorikan sangat kurang, rasio ketergantungan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat dan rasio kemandirian keuangan daerah sangat rendah dan masuk pada pola instruktif (Oki dkk, 2020).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menganalisis kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berbeda dengan penelitian Oki dkk, pangaribuan dan Hamid yang menggunakan metode kuantitatif penelitian ini menggunakan metode kualitatif, serta berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mana penelitian ini berfokus pada kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari

II. METODE

Penelitian ini menggunakan analisis kemandirian keuangan yang mempunyai indikator yaitu rasio kemandirian keuangan, rasio ketergantungan keuangan, rasio derajat desentralisasi dan rasio efektivitas pengelolaan PAD (Mahmudi, 2019). Dan juga peneliti melihat dari segi tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat dinilai dengan indeks pembangunan manusia (United Nations Development Programme). Penulis mengumpulkan data berupa data primer dan data sekunder

dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data primer, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari, Sekretaris BPKAD, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Staf dan Pelaksana Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Adapun pengumpulan data sekunder melalui data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2017-2021 serta data dari Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Manokwari Tahun 2017-2021.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manokwari menggunakan rasio kemandirian keuangan, rasio ketergantungan keuangan, rasio derajat desentralisas dan rasio efektivitas pengelolaan PAD dan melihat Indeks Pembangunan Manusia serta bagaimana kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Rasio Kemandirian

Penulis melakukan pengukuran terhadap kemandirian keuangan daerah menggunakan rasio kemandirian keuangan dengan cara membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan dari pihak eksternal. Rasio kemandirian keuangan daerah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 1.

Pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Kemampuana Keuangan	Kemandirian %	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	25-50%	Konsultif
Sedang	50-75%	Partisipatif
Tinggi	75-100%	Delegatif

Sumber : Mahmudi (2004: 189)

Hasil penelitian dan perhitungan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manokwari dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2017-2021 nampak terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari**

Tahun	PAD	Pendapatan Eksternal	Rasio Kemandirian	Keterangan
2017	54.373.489.498	1.228.750.778.927	4,98	Instruktif
2018	90.855.363.704	1.235.208.920.903	9,23	Instruktif
2019	102.053.492.440	1.376.669.340.928	9,42	Instruktif
2020	83.389.821.626	1.363.602.264.497	9,52	Instruktif
2021	96.648.098.563	1.180.288.136.681	9,36	Instruktif

Sumber: diolah oleh penulis dari LRA APBD Kabupaten Manokwari tahun 2017-2021

Berdasarkan Tabel 2. Perhitungan nilai rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manokwari dari tabel tahun 2017-2021, mengalami naik turun dan masih berada di angka presentase yang sangat rendah, ini membuktikan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah yaitu dibawah 25% dan berada pada pola hubungan instruktif yang berarti peran pemerintah pusat masih sangat mendominasi dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

3.2 Rasio Ketergantungan

Rasio derajat tingkat ketergantungan keuangan daerah bertujuan untuk mengukur tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan eksternal khususnya pendapatan transfer. Cara perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah adalah dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total pendapatan. Berikut Rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah adalah:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Presentasi penilaian terhadap rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.**Presentasi Penilaian Terhadap Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Presentase	Kriteria Ketergantungan
00-10,0	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Cukup Rendah
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Halim (2004)

Hasil penelitian dan perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Manokwari dalam 5 tahun terakhir yaitu 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan	Keterangan
2017	1.090.774.440.529	1.228.750.778.927	88,77	Sangat Tinggi
2018	983.666.707.199	1.235.208.920.903	79,63	Sangat Tinggi
2019	1.082.773.086.488	1.376.669.340.928	78,65	Sangat Tinggi
2020	875.279.389.209	1.363.602.264.497	64,18	Sangat Tinggi
2021	1.032.150.493.503	1.180.288.136.681	87,44	Sangat Tinggi

Sumber: diolah oleh penulis dari LRA APBD Kabupaten Manokwari tahun 2017-2021

Dari perhitungan rasio ketergantungan memperlihatkan bahwa masih tinggi tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Manokwari terhadap pemerintah pusat/pemerintah provinsi setempat. Bisa dilihat bahwa pada 5 tahun anggaran terakhir rasio ketergantungan daerah berada di atas 50% dan di setiap tahun anggarannya mengalami naik turun tingkat ketergantungan keuangan daerah.

3.3 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal bertujuan untuk mengukur kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5.

Presentasi Penilaian Terhadap Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah

Presentase	Kriteria
00-10,0	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber. Halim (2004)

Hasil penelitian dan perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal keuangan daerah Kabupaten Manokwari dalam 5 tahun terakhir yaitu 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Keterangan
2017	54.373.489.498	1.228.750.778.927	4,42	Sangat Kurang
2018	90.855.363.704	1.235.208.920.903	7,35	Sangat Kurang
2019	102.053.492.440	1.376.669.340.928	7,41	Sangat Kurang
2020	83.389.821.626	1.363.602.264.497	6,11	Sangat Kurang
2021	96.648.098.563	1.180.288.136.681	8,18	Sangat Kurang

Sumber: diolah oleh penulis dari LRA APBD Kabupaten Manokwari tahun 2017-2021

3.4 Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD

Rasio efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menunjukkan bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan daerah yang telah direncanakan sehingga realisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dengan didasarkan potensi rill daerah. Berikut rumus menghitung tingkat efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 7.

Presentasi Penilaian Terhadap Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD

Presentase	Kriteria
<75	Tidak Efektif
75-89	Kurang Efektif
90-99	Cukup Efektif
100	Efektif
>100	Sangat Efektif

Sumber: Mahmudi (2019)

Hasil penelitian dan perhitungan Rasio efektivitas Pengelolaan PAD Kabupaten Manokwari dalam 5 tahun terakhir yaitu 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.

Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Manokwari

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Efektivitas PAD	Keterangan
2017	56.422.377.432	54.373.489.498	103,76	Sangat Efektif
2018	90.863.070.042	90.855.363.704	100,00	Efektif
2019	108.554.356.172	102.053.492.440	106,37	Sangat Efektif
2020	83.389.821.626	83.389.821.626	101,45	Sangat Efektif
2021	102.675.625.975	96.648.098.563	94,12	Cukup Efektif

Sumber: diolah oleh penulis dari LRA APBD Kabupaten Manokwari tahun 2017-2021

Perhitungan rasio efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manokwari mulai dari tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa

presentase yang sangat rendah yaitu mempunyai rata-rata 60,38%.Hal tersebut dikategorikan tidak efektif itu berarti pemerintah daerah belum mampu meralisasikan penerimaan daerah yang telah direncanakan dengan benar.

3.5 Kesejahteraan Masyarakat

Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah di daerah dari aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat yang pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah khususnya di Kabupaten Manokwari. Badan program pembangunan PBB (UNDP) menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai indikator kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara atau wilayah. Yang mana indikator IPM terdiri dari tiga karakteristik utama pembangunan manusia. Indikator harapan hidup mewakili aspek kesehatan yang berarti memiliki rentang hidup yang panjang, indikator harapan lama sekolah dan panjang rata-rata sekolah mewakili aspek pendidikan, dan dimensi ekonomi yang berarti memiliki kehidupan yang layak dijelaskan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Tabel.9

Kriteria penilaian indeks pembangunan manusia dapat dilihat pada tabel berikut:

Nilai IPM	Tingkatan
<60	Rendah
60<IPM<70	Menengah
70<IPM<80	Tinggi
IPM>80	Sangat Tinggi

Sumber. www.bps.go.id

Berikut ini merupakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Manokwari selama 5 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan 2021:

Tabel 10.

Indeks Pembangunan Manusia Daerah Kabupaten Manokwari

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia	Keterangan
2017	70.67	Tinggi
2018	71.17	Tinggi
2019	71.67	Tinggi
2020	72.01	Tinggi
2021	72.02	Tinggi

Sumber. www.bps.go.id

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan nilai IPM di Kabupaten Manokwari setiap tahunnya mengalami kenaikan yaitu tahun 2017 berada di angka 70.67% dan terus naik hingga angka 72.02% dan mempunyai rata-rata IPM yaitu 71.50% .

Kabupaten Manokwari berada di tingkat kriteria kategori tinggi yang mana memiliki Indeks Pembangunan dari tahun 2017-2021 memiliki nilai yang berkisar antara 71-72 sesuai dengan kriteria penilaian Indeks Pembangunan Manusia. Pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dapat mempertahankan kriteria kategori tinggi IPM dan perlu lagi dalam memaksimalkan perannya untuk meningkatkan IPM di daerah Kabupaten Manokwari.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Penulis menemukan temuan penting yakni dengan kemandirian keuangan daerah yang tinggi dapat mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah. Sama halnya dengan temuan Pangaribuan bahwa Kemandirian keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) (Pangaribuan, 2020). Selanjutnya Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manokwari dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2021 masih sangat rendah, sedangkan berbeda dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari yang terus meningkat setiap tahunnya. Seperti temuan Oki bahwa rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Belu dikategorikan sangat kurang, rasio ketergantungan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat. Dan rasio kemandirian keuangan daerah sangat rendah dan masuk pada pola instruktif (Oki dkk, 2020). Temuan Hamid yaitu terdapat pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pendapatan perkapita, terdapat pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap angka usia harapan hidup dan terdapat pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap lama sekolah (Hamid, 2018). Dari uraian diatas penulis dapat simpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Manokwari tidak berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manokwari.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manokwari dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2017-2021 masih sangat rendah dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah yaitu 8,5% Rata-rata rasio derajat ketergantungan yaitu 79,7%, Rata-rata rasio desentralisasi fiskal yaitu 6,69%, Rata-rata rasio efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yaitu 60,38%, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah berada pada tingkat kategori tinggi dengan rata-rata IPM yaitu 71.50%. Sehingga dalam membiayai dan memenuhi kebutuhan pemerintahan daerah harus fokus kepada kemandirian keuangan daerah karena masih bergantung pada pemerintah pusat. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan daerah

khususnya PAD dan meningkatkan serta memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga Kabupaten Manokwari tidak bergantung pada dana transfer dari provinsi/pusat. Kabupaten Manokwari juga harus mengubah peraturan daerah tidak jelas yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manokwari sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Mahmudi. **Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis, serta terima kasih penulis tujukan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini terutama kepada kedua orang tua penulis yang selalu mendukung dan mendoakan hingga terselesaikannya penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta; Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi, 2019 *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Sugiyono. 2016. *Metode Penulisan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- 2019. *Metode Penulisan Kualitatif, Kuantitatif R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Berliani, K, 2016. “*Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka*”. Jurnal Indonesia Membangun, 15(2).
- Hamid, A.A. 2018. “ *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten*

- Majalengka – Jawa Barat*". Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi), 1(4), 38-51
- Indrayanti, W. 2020. "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Riau Tahun 2008-2017*". *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Investasi*, 1(4), 38-51
- Nasution, D. A. D. 2018. "*Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*". *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Raine, A., Mire, M. S., & Paminto, A. 2018. "*Analisis Kemandirian keuangan daerah*". *Inovasi*, 12(2), 92.
- Sibarani, E. M. 2018. "*Analisis Kesadahan Total Dan Alkalinitas Pada Air Bersih Sumur Bor Dengan Metode Titrimetri Di PT Sucofindo Daerah Provinsi Sumatera Utara*", Universitas Sumatera Utara Skripsi, 44-48.
- Syahputra, R. 2017. "*Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang*". *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(1), 12-21
- <http://manokwarikab.bps.go.id>. *Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Manokwari Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2017-2021*.
Senin, 12 September 2022
- <http://manokwarikab.bps.go.id>. *Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2017– 2021*.
Senin, 12 September 2022
- <http://manokwarikab.bps.go.id>. *Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Kabupaten Manokwari*.
Selasa 13 September 2022